



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 109 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN SUKARESMI TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Sukaresmi Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Sukaresmi Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SUKARESMI TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 109**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 109 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN  
SUKARESMI TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5

tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema “ **Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat** “ untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Sukaresmi sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Sukaresmi telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang

memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.*

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di

tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan<sup>1</sup> dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Sukaesmi Tahun 2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816 );
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kecamatan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288 );
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah ;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34 );

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
24. Peratutan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
25. Peratutan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 26 );
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
29. Keputusan Camat Sukaesmi Nomor : **050/43-Kec/2019** tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sukaesmi Tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sukaresmi guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sukaresmi Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Sukaresmi;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Sukaresmi Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I Pendahuluan**

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Perangkat ;

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sukaresmi tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Sukaresmi sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Sukaresmi berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Sukaresmi tahun-tahun sebelumnya.

2.1.1 Evaluasi Capaian Program / Kegiatan Renja 2020

2.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut Tahun 2020.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukaresmi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Sukaresmi;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sukaresmi, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

## **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Sukaresmi

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukaresmi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Sukaresmi merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sukaresmi Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukaresmi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaresmi selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukaresmi Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :
    - 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu :
    - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - 2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu :
    - 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :
    - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresmi Tahun 2020 telah terlewat. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2020**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresmi dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 5 (lima) Program 32 (tiga puluh dua) dan Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 62,82 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 6.000.000,- terealisasi Rp. 5.296.254,-
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional prosentase realisasi keuangan 69,51 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.280.000,- terealisasi Rp. 1.019.500,-
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor prosentase realisasi keuangan 69,51 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 13.100.000,- terealisasi Rp. 13.100.000,-
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja prosentase realisasi keuangan 100

- % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.600.000,- terealisasi Rp. 2.600.000,-
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 48.551.000,- terealisasi Rp. 48.551.000,-
  - f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 8.845.000,- terealisasi Rp 8.845.000,-
  - g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Bngunan Kantor prosentase realisasi keuangan 3.500.000 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 0,- terealisasi Rp 3.500.000,-
  - h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 9.125.000,- terealisasi Rp. 9.125.000,-
  - i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 3.000.000,- terealisasi Rp. 3.000.000,-
  - j. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 9.000.000,- terealisasi Rp. 9.000.000,-
  - k. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan Ke Dalam Daerah prosentase realisasi keuangan 99,38 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 28.320.000,- terealisasi Rp. 25.460.00,-
  - l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan

- Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor prosentase realisasi keuangan 98,76 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 62.220.000,- terealisasi Rp. 0,-
- m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 98,76 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 372.000.000,- terealisasi Rp. 351.771.700,-
- n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedungkantor prosentase realisasi keuangan 98.00 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 73.761.000,- terealisasi Rp. 71.006.000,-
- o. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Mebeuler prosentase realisasi keuangan 98% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 36.500.0000,- terealisasi Rp. 36.132.000,-
- p. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutim / Berkala / Kendaraan Dinas/ Operasional prosentase realisasi keuangan 70% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.945.000,- terealisasi Rp. 4.435.000,-
- q. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas prosentase realisasi keuangan 95% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 199.700.000,- terealisasi Rp. 199.096.000,-
- r. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan Teknis Perlombaan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.560.000,- Rp. 4.560.000,-
- s. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat

- Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 1.383.750,- Rp. 1.383.750,-
- t. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 5.135.000,- Rp. 5.135.000,-
- u. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 80 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 8.550.000,- Rp. 7.125.000,-
- v. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Monitoring dan Pembinaan RT/RW prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 1.770.000,- Rp. 1.770.000,-
- w. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.250.000,- Rp. 15.250.000,-
- x. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 6.500.000,- Rp. 6.500.000,-
- y. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 85% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 39.880.000,- Rp. 37.538.756,-
- z. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Unit Kerja

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 855.000,- Rp. 855.000,-

aa. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.335.000,- Rp. 2.335.000,-

bb. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.250.000,- Rp. 2.250.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	5.295.254	62,82
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.280.000	1.019.500	69,51
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.100.000	13.100.000	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.600.000	4.600.000	25,00
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.551.000	48.551.000	99,84
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.845.000	8.845.000	
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	3.500.000	

8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.125.000	9.125.000	
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	3.000.000	92,86
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	9.000.000	9.000.000	95,83
11	Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan Ke Dalam Daerah	28.320.000	25.460.000	99,38
12	Kegiatan Pengadaan Pelengkapan Gedung/Kantor	73.761.000	71.006.000	98,76
13	Kegiatan Pengadaan Mebeuler	36.500.000	36.132.000	
14	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas	199.700.000	199.096.000	99,12
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	52.400.000	52.101.145	99,12
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	7.945.000	4.435.000	81,46
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	5.000.000	3.582.500	0
18	Kegiatan Pembinaan Teknis Perlombaan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan	4.560.000	4.560.000	100
19	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	1.383.750	1.383.750	
20	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan	5,135.000	5,135.000	
21	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	8.550.000	7.125.000	
22	Kegiatan Monitoring dan Pembinaan RT/RW	1.770.000	1.770.000	100
23	Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan	15.250.000	15.250.000	100
24	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	6.500.000	6.500.000	0
25	Kegiatan Monitoring Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	39.880.000	37.538.756	
26	Kegiatan Pembinaan Unit Kerja Pemerintah daerah dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	855.000	855.000	100

27	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	2.335.000	2.335.000	100
28	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	2.250.000	2.250.000	99,93
29	Kegiatan LAPHALI ( Layanan Pada Hari Libur)	22.000.000	0	0

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresmi dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

- a. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan Teknis Perlombaan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.560.000,- terealisasi Rp. 4.560.000,-
- b. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Monitoring dan Pembinaan RT/RW prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 1.770.000,- terealisasi Rp. 1.770.000,-
- c. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan Unit Kerja Pemerintah daerah dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 855.000,- terealisasi Rp. 855.000,-
- d. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.335.000,- terealisasi Rp. 2.335.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target**  
**Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Pembinaan Teknis Perlombaan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan	4.560.000	4.560.000	100
2	Kegiatan Monitoring dan Pembinaan RT/RW	1.770.000	1.770.000	100
3	Kegiatan Pembinaan Unit Kerja Pemerintah daerah dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	855.000	855.000	100
4	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	2.335.000	2.335.000	100

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2020, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresmi

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;

b. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresmi adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresmi Tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sukaresmi pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresmi berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Sukaresmi
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### **2.1.2 Evaluasi Capaian Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut Tahun 2020**

Renstra SKPD Kecamatan Sukaresmi merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sukaresmi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Sukaresmi yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang

disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82.75</b>	<b>102.16</b>	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	B	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>B</b>	<b>100.00</b>	
4	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor									

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Sukaresmi tahun 2020, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.

2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakiip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102, 16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukaresmi Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Sukaresmi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian**  
**Renstra SKPD s/d Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.7.01.31.82.	<b>Program penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)</b>		39.832.000	14.250.000	36.250.000	36.250.000	1,00	36.250.000	50.500.000	1,27
7.01.7.01.31.82.001.	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelaksanaan pelayanan sesuai prosedur	13 Jenis Pelayanan	15.632.000	14.250.000	14.250.000	1,00	14.250.000	42.750.000	2,73
7.01.7.01.31.82.001.	Penyelenggaraan Layanan Pada Hari Libur	Jumlah Pengelola/Pe tugas Layanan Pada Hari Libur	51 HOK	24.200.000		22.000.000	1,00	22.000.000,00	44.000.000	1,82
7.01.7.01.31.82.	<b>Program penyelenggaraan tugas Pemerintah Umum tingkat Kecamatan</b>		1.392.605.000	106.540.000	902.000.000	171.801.000	0,19	171.801.000	278.341.000	0,20
7.01.7.01.31.82.137.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	20.000.000	9.840.000	24.000.000	0,41	9.840.000	29.520.000	1,48
7.01.7.01.31.82.009	Pembinaan Teknis pelaksanaan perlombaan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terseleksi	1 Kegiatan	60.000.000	4.500.000	17.380.000	0,26	4.560.000	13.620.000	0,23

7.01.7.01.31.82.007.	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Desa	1 Kegiatan	24.000.000		12.000.000	-	-		24.000.000	1,00
7.01.7.01.31.82.019.	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Pencapaian Target PBB	1 Kegiatan	24.000.000	9.055.000	12.285.000	9.285.000	0,76	9.285.000	27.625.000	1,15
7.01.7.01.31.82.007.	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKOPIMCAM)	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan	1 Kegiatan	300.000.000		12.665.000	-	-		-	0,00
7.01.7.01.31.82.007.	Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	JMonitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	12 Desa	24.000.000		22.000.000	-	-		-	0,00
7.01.7.01.31.82.132.	Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	50.000.000	17.230.000	25.990.000	15.250.000	0,59	15.250.000	47.730.000	0,95
7.01.7.01.31.79.134.	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (LPTQ Tingkat Kabupaten)	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Kepemudaa n dan Olah Raga	1 Kegiatan	100.000.000			-	-		-	-
7.01.7.01.31.79.134.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga (PORKAB)	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Kepemudaa n dan Olah Raga	1 Kegiatan			50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	100.000.000	
7.01.7.01.31.82.007.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	1 Kegiatan	32.000.000		32.000.000	-	-		-	0,00

7.01.7.01.31.82.147.	Monitoring Proyek Pembangunan	Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan Pemerintahan Desa	12 Desa	24.000.000	19.680.000	24.135.000	13.680.000	13.680.000	47.040.000	0,29
7.01.7.01.31.82.048.	Pembinaan dan Pembinaan Anggota LINMAS Tingkat Kecamatan	Jumlah pelatihan Anggota LINMAS Desa	1 Kegiatan		8.555.000		8.135.000	8.135.000	24.825.000	#DIV/0!
7.01.7.01.31.82.049.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat pertemuan Rutin PKK	1 Kegiatan	20.605.000	8.550.000	20.550.000	8.550.000	0,42	25.650.000	1,24
7.01.7.01.31.79.144.	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/ Acara Lainnya	Jumlah Upacara Hari Besar nasional dan Upacara/ Acara lainnya yang dilaksanakan	1 Kegiatan	25.000.000	15.450.000	25.000.000	14.826.000	14.826.000	45.102.000	0,33
7.01.7.01.31.82.007.	Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam Pengembangan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam Pengembangan lembaga kemasyarakatan LPM dan BPD	1 Kegiatan		13.680.000		13.680.000	-	41.040.000	
7.01.7.01.31.82.099.	Monitoring dan Pembinaan RT RW	Jumlah Monitoring dan Pembinaan RT RW	12 kali	24.000.000		23.995.000	23.995.000	-	47.990.000	2,00
7.01.7.01.31.82.099.	Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit Kendaraan Pengelolaan Sampah	1 Unit	665.000.000		600.000.000		-	-	-
7.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran</b>		144.534.500	132.327.000	160.000.000	127.521.000	0,80	259.848.000	1,80

7.01.7.01.31.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	7.920.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	1,00	7.200.000	21.600.000	2,73
7.01.7.01.31.01.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran STNK	4 Unit	3.300.000	2.280.000	3.000.000	2.280.000	0,76	2.280.000	6.840.000	2,07
7.01.7.01.31.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksana out sourcing kebersihan	720 OB	14.410.000		13.100.000	13.100.000	-	13.100.000	26.200.000	1,82
7.01.7.01.31.01.008.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang Memadai	11 unit	5.060.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	1,00	4.600.000	13.800.000	2,73
7.01.7.01.31.01.009.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK sesuai kebutuhan	42 Jenis	42.131.100	38.301.000	38.301.000	38.551.000	1,01	38.551.000	115.403.000	2,74
7.01.7.01.31.01.010.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	9.729.500	8.845.000	8.845.000	8.845.000	1,00	8.845.000	26.535.000	2,73
7.01.7.01.31.01.011.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penerangan Gedung kantor yang memadai	5 Jenis	9.729.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1,00	3.500.000	10.500.000	1,08
7.01.7.01.31.01.012.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	4 jenis	10.805.300		9.823.000		-		-	0,00
7.01.7.01.31.01.013.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang memadai	12 Jenis	10.037.500	9.125.000	9.125.000	9.125.000	1,00	9.125.000	27.375.000	2,73
7.01.7.01.31.01.014.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	11 exemplar	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	9.000.000	2,73

7.01.7.01.31.01.015.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat di Kecamatan	720 dus	19.245.600	17.496.000	17.496.000	9.000.000	0,51	9.000.000	35.496.000	1,84
7.01.7.01.31.01.017.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait beserta Desa	182 kali	4.433.000	37.980.000	37.980.000	28.320.000	0,75	28.320.000	94.620.000	21,34
7.01.7.01.31.01.017.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait beserta Desa	182 kali	4.433.000		4.030.000				-	0,00
7.01.7.01.31.06.	Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur			50.000.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	22.500.000	0,45
7.01.7.01.31.06.04.	Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	1 Orang			-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.31.06.085.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	1 Orang		-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.31.06.085.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	1 Orang		-	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	30.000.000	
7.01.7.01.31.03.001.	Pengadaan Mesin /Kartu absensi	Jumlah Mesin /Kartu absensi memadai	1 unit			-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.31.03.002.	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang memadai	30 Stel	50.000.000	7.500.000	-	-	-	-	7.500.000	
7.01.7.01.31.03.005.	Pengadaan pakaian Khusus HariHari Terentu/Tradisional	Jumlah Pakaian Trdisional yang memadai	30 Potong			-	-	-	-	-	
7.01.7.01.31.00.000.	Pengadaan pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang memadai	30 Stel			-	-	-	-	-	
7.01.7.01.31.011.	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan			55.000.000	5.000.000	50.000.000	5.000.000	0,10	5.000.000	10.000.000	0,18

7.01.7.01.31.06.002.	Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Laporan Keuangan	60 Laporan	25.000.000	-	25.000.000	0	0,00	-	0,00
7.01.7.01.31.06.002.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Laporan Keuangan	60 Laporan	30.000.000	5.000.000	25.000.000	5.000.000	0,20	5.000.000	15.000.000
7.01.7.01.31.02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5.503.000.000	146.900.000	2.548.000.000	306.945.000	0,12	369.165.000	516.065.000
7.01.7.01.31.02.024.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Jumlah Kendran Dinas Roda 2 yang memadai	-	250.000.000		50.000.000	-	-		-
7.01.7.01.31.02.010.	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebeulair yang memadai	8 item	100.000.000		36.780.000	36.780.000	1,00	36.780.000	73.560.000
7.01.7.01.31.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	4 Unit	8.739.500	7.945.000	7.945.000	7.945.000	1,00	7.945.000	7.945.000
7.01.7.01.31.02.016	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab			138.955.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	138.955.000
7.01.7.01.31.02.042	Pengadaan Tanah Kecamatan	Jumlah Tanah untuk Bangunan Kantor Kecamatan	1 paket	4.500.000.000		-	-	-	-	-
7.01.7.01.31.02.017	Penataan Halaman dan Gedung Kantor	Jumlah Halaman dan Gedung Kantor yang di Tata		500.000.000						-
7.01.7.01.31.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	8 unit	114.260.500	-	62.260.000	62.220.000	1,00	62.220.000	62.220.000
7.01.002.006.6.	Pengadaan Alat Berat	Jumlah Alat Berat Sesuai Kebutuhan	1 unit		-	2.000.000.000		0,00	62.220.000	62.220.000

7.01.7.01.31.02.019	Penambahan Lokal Gedung Kantor Kantor	Jumlah Gedung kantor yang memadai	1 Gedung	-					-	-	
7.01.7.01.31.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang memadai	4 Gedung	30.000.000	191.015.000		0,00	0	-		
				7.184.971.500	412.517.000	3.711.250.000	662.517.000	3	724.737.000	1.799.771.000	0,25

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Sukaresmi sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sukaresmi  
Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyek si Tahun 2021	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Indeks kepuasan masyarakat			82	82,5	82,5	823	83	82,75		82	
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
3	Kategori Pelayanan Prima Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			BB	BB	A-	A-	A	BB		BB	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukaresmi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

#### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus

benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukaresmi serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Sukaresmi berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sukaresmi

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Sukaresmi sebesar Rp. 2.810.503.259,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Sukaresmi diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Sukaresmi mengusulkan 6 (enam) Program dengan 40 (empat puluh) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Sukaresmi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kabupaten Garut

Kecamatan Sukaesmi

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp000)	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2,810,503,259	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2,810,503,259		
	1	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	57,291,50	1	57,291,50	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	57,291,50		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sukaesmi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	57,291,50		57,291,50	Kec. Sukaesmi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	57,291,50
	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,729,885,929	2	1,729,885,929		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,729,885,929
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukaesmi	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1,723,524,629		1,723,524,629	Kec. Sukaesmi	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1,723,524,629
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sukaesmi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	6,361,300		6,361,300	Kec. Sukaesmi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	6,361,300
	3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	26,400,000	3	26,400,000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	26,400,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tupoksi	Kec. Sukaesmi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti	3 Orang	26,400,000		26,400,000	Kec. Sukaesmi	Jumlah Pakaian Dinas	24 stel	26,400,000	

<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>160,455,560</b>	<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>160,455,560</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyediaan komponen/Instalasi Listrik/Penerangan Abangunan Kantor	10 item	4,581,300		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyediaan komponen/Instalasi Listrik/Penerangan Abangunan Kantor	10 item	4,581,300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	80,238,860		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	80,238,860
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9 item	2,535,400		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9 item	2,535,400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	35,054,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	35,054,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyediaan Surat Kabar	1 Tahun	9,126,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyediaan Surat Kabar	1 Tahun	9,126,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 kali	14,400,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 kali	14,400,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	14,520,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	14,520,000
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	<b>44,754,000</b>	<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	<b>44,754,000</b>
	Pengadaan Mebel	Kec. Sukaresmi	Jumlah Mebel Yang Layak Pakai	100 %	44,754,000		Pengadaan Mebel	Kec. Sukaresmi	Jumlah Mebel Yang Layak Pakai	100 %	44,754,000

<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>25,340,500</b>	<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>25,340,500</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	15,000,000		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukaresmi	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 unit	3,883,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukaresmi	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 unit	3,883,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sukaresmi	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 t	6,457,500		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sukaresmi	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 t	6,457,500	
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	<b>359,315,500</b>	<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	<b>359,315,500</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Unit Pembayaran STNK dan Pemeliharaan Dinas	6 unit	92,299,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Unit Pembayaran STNK dan Pemeliharaan Dinas	6 unit	92,299,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sukaresmi	JumlahGedung / Bangunan yang Terpekihara	1 Gedung	267,016,500		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sukaresmi	JumlahGedung / Bangunan yang Terpekihara	1 Gedung	267,016,500	

II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>200,111,340</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>200,111,340</b>		
	1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>180,707,340</b>	1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>180,707,340</b>	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukaesmi	Jumlah Lapoaran Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukaesmi 180,707,340	Jumlah Lapoaran Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan

		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100 %		<b>19,404,000</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100 %		<b>19,404,000</b>
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyusuna SP/SOP Pelayanan dan SKP yang ada di Kecamatan	1 Tahun		19,404,000		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Penyusuna SP/SOP Pelayanan dan SKP yang ada di Kecamatan	1 Tahun		19,404,000
III		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %		<b>5,359,850</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %		<b>5,359,850</b>
	1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %		<b>5,359,850</b>	1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %		<b>5,359,850</b>
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Forum Musyawarah Pembangunan di Tingkat Desa	12 Kali		5,359,850		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Forum Musyawarah Pembangunan di Tingkat Desa	12 Kali		5,359,850
	2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %		<b>0</b>	2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %		<b>0</b>
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7 Desa		0		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12 Desa		0

IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>115,313,200</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>115,313,200</b>		
	1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>115,313,200</b>	1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>115,313,200</b>		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	64,188,200		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	64,188,200
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat	3 Kali	51,125,000		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat	3 Kali	51,125,000
	2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada			
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>12,905,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>12,905,000</b>		

1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	100 %	<b>12,905,000</b>	1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>12,905,000</b>	100 %	<b>12,905,000</b>		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional (PHBN)	1 Kali	12,905,000		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sukaresmi	12,905,000	1 Kali	12,905,000		
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukaresmi	Jumlah Rapat Sosialisasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Tahun	50,000,000		Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukaresmi		1 Tahun	50,000,000		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan	1 Tahun			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sukaresmi		1 Tahun			
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>73,370,880</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			100 %	<b>73,370,880</b>		
	1	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>73,370,880</b>	1	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>73,370,880</b>	100 %	<b>73,370,880</b>		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan	1 Tahun	42,360,000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan	1 Tahun	42,360,000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Razia	1 Tahun	21,010,880		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukaresmi	Jumlah Pelaksanaan Razia	1 Tahun	21,010,880	

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Sukaresmi	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	10,000,000		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Sukaresmi	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	10,000,000		
<b>Jumlah</b>					<b>2,810,503,259</b>							<b>2,810,503,259</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Sukaresmi melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Sukaresmi mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022 Kabupaten Garut

Kecamatan Sukaresmi :

### Daftar Kegiatan yang Disepakati

LAMPIRAN : BERITA ACARA KESEPAKATAN

BIDANG : PEMERINTAHAN

No	Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadaan Sarpas Poskamling	7 Desa	7	
2.	Pembinaan Linmas Desa	7 Desa	7	
3.	Bantuan Guru Ngaji	7 Desa	7	
4.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	7 Desa	7	
5.	Pengadaan Pakaian Linmas	7 Desa	7	

6.	Pembinaan LPM, RT dan RW	7 Desa	7	
7.	Pembinaan Kader PKK	7 Desa	7	
8.	Bimtek Perencanaan untuk Desa	7 Desa	7	
9.	Pembinaan Kader Dasa Wisma	7 Desa	7	
10.	Sarana Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	7 Desa	7	
11.	Bantuan modal BUMDES	7 Desa	7	
12.	Bantuan sosial dan Beasiswa untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin	7 Desa	7	
13.	Peningkatan Kapasitas SDM IMP	7 Desa	7	
14.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7 Desa	7	
15.	Sosialisasi Peraturan Pernikahan	7 Desa	7	
16.	Sidang Isbat Nikah Massal	7 Desa	7	
17.	Peningkatan Kapasitas	7 Desa	7	

	koordinasi lintas sektor			
18.	Sosialisasi dan Peningkatan kapasitas SDM pengurus Pokja dan Poktan Kampung KB	7 Desa	7	

### Daftar Kegiatan yang Disepakati

LAMPIRAN : BERITA ACARA KESEPAKATAN

BIDANG : EKONOMI

No	Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bantuan Traktor Roda Dua	5 Desa	5	
2.	Bantuan Pengadaan Mesin Pasca Panen Kopi	Desa Mekarjaya Desa Sukajaya Desa Sukalilah	3	
3.	Pemberdayaan/Bantuan Modal Usaha Pemuda Produktif	Desa Sukajaya Desa Mekarjaya	2	
4.	Bantuan mesin Konveksi	Desa Sukamulya	1	
5.	Bantuan Perkuatan Modal Perempuan	Desa Sukajaya Desa Cintadamai	2	
6.	Bantuan Modal Bumdes	7 Desa	7	
7.	Hibah Barang untuk Usaha Ekonomi Masyarakat berupa Genset dll.	Desa Sukamulya	1	

8.	Pelatihan dari LPK	7 Desa	7	
9.	Bantuan Mesin Bata Merah	Desa Mekarjaya	1	
10.	Bantuan mesin pengolahan Gula Aren	Desa Cintadamai	1	
11.	Penataan Desa Wisata Kopi	Desa Sukalilah	1	
12.	Pemasangan WIFI di Pesantren-pesantren	7 Desa	7	
13.	Peningkatan Kapasitas Pemuda	7 Desa	7	
14.	Pengadaan Pompa Air	4 Desa	4	
15.	Bantuan Ternak Domba	7 Desa	7	

### Daftar Kegiatan yang Disepakati

LAMPIRAN : BERITA ACARA KESEPAKATAN

BIDANG : SOSIAL BUDAYA

No	Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peralatan Posyandu	7 Desa	7	
2.	Pembangunan Sumur Bor PNF/Kesetaraan	Desa Sukamulya Desa Sukajaya	2	
3.	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	Desa Sukamulya Desa	3	

		Sukajaya Desa PAdamukti		
4.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Desa Sukaesmi Desa Padamukti Desa Mekarjaya Desa Cintadamai	10	
5.	Rehabilitasi PUSTU	Desa Cintadamai	1	
6.	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	Desa Mekarjaya	1	
7.	Rehab/Peningkatan Lapangan Sepak Bola Desa	Desa Sukamulya	1	
8.	Rehab Ruang Kelas PAUD	Desa Padamukti	1	
9.	Rehab Ruang Kelas SMP Cilegong	Desa Sukalilah	1	
10.	Pembangunan Posyandu	7 Desa	7	
11.	Pendataan / Pemutakhiran Data profil Kesehatan Desa	7 Desa	7	
12.	Kegiatan Posyandu	7 Desa		

13.	Kegiatan Desa Siaga Aktif	7 Desa	7	
14.	Kegiatan Poskesdes	7 Desa	7	
15.	Penyediaan Media untuk penyuluhan	7 Desa	7	
16.	Pembinaan dan Evaluasi kegiatan Desa Siaga Aktif	7 Desa	7	
17	Penyuluhan Kesehatan Kepada Masarak	7 Desa	7	
18	Desa yang melaksanakan STBM			

### Daftar Kegiatan yang Disepakati

LAMPIRAN : BERITA ACARA KESEPAKATAN

BIDANG : INFRASTRUKTUR

No	Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volum e	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan Ruang Belajar PAUD	Desa Sukamulya	1	
2.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perdesaan	Desa Sukajaya	1	
3.	Pemasangan PJU Jalan Umum dan Makam	7 Desa	7	
4.	Pemberian Kerja Sementara Padat Karya	Desa Sukajaya	1	
5.	Pembangunan TPT Cegah Kumuh	Desa Sukalilah	50	

6.	Pengamanan Tanggul DAS Cikokok	Sungai Cikokok	1	
7.	Rehab Jembatan Golangsing	Desa Mekarjaya	1	
8.	Peningkatan Jalan 1.500m	Desa	1	
9.	Pembangunan Turap, Talup dan Boronjong	Desa	1	
10	Rehab RUTILAHU	Desa Sukamulya	250	
11	Pembangunan Kantor Polsek	Kecamatan	1	
12	Pembangunan Kantor Koramil	Kecamatan	1	
13	Pembangunan Kantor MUI	Kecamatan	1	
14	Pembangunan TPT makam di dua lokas		2	
15	Pembangunan TPT Drainase selokan		1	
16	Pembangunan TPT Jalan lingkungan		1	
17	Pembangunan Asrama Pesantren Parohan	Desa Cintadamai	1	
18	Pembangunan Madrasah Kp. Pasir Luhur	Desa Cintadamai	1	
19	Pembangunan Madrasah Kp. Pakuhaji	Desa Cintadamai	1	
20	Pembangunan Asrama Putra	Desa	1	

	Pesantren	Sukaesmi		
21	Pembangunan Aula SMP Fauzaniyyah	Desa Sukaesmi	1	
22	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kp. Babakan	Desa Sukajaya	1	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Sukaresmi guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Sukaresmi di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang

dilaksanakan di Kecamatan Sukaresmi yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukaresmi telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Sukaresmi mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Sukaresmi Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Sukaresmi Tahun 2022 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

### 3. Nilai Sakip

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Sukaresmi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Sukaresmi Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %
2	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tk. Kecamatan</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100%
		Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor	Nilai Sakip	B

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Sukaresmi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Sukaresmi sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sukaresmi diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Sukaresmi merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target

MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Sukaresmi diimplementasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukaresmi Program dan kegiatan yang dirancang pada Tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam

pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Sukaresmi diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Sukaresmi sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Sukaresmi melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sukaresmi Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 14 (Empat Belas) Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sukaresmi sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sukaresmi dan mencakup semua Desa.

4. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 2,810,503,259,-

Adapun Program Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Peningkatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa .

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Sukaresmi pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Garut

Kecamatan Sukaresmi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	1	<b>KECAMATAN</b>								2.810.503 .259			4.862.254 .438				
7	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								2.403.442 .989			4.302.283 .236			
7	1	1	02: 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								57.291.50 0			63.020.65 0		
7	1	1	02:0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah dokumen perencana an	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukares mi, Sukares mi	100 %	1 dokumen	100 %	57.291.500		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	63.020.650
7	1	1	02:0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukares mi, Sukares mi	100 %	1 dokumen	100 %	-		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	-

<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02:02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1.729.885.929</b>					<b>1.902.874.521</b>
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 bulan	100 %	1.723.524.629			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.895.877.091
7	1	1	02:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah pelaporan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	6.361.300			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	6.997.430
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02:05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>26.400.000</b>				<b>29.040.000</b>	
7	1	1	02:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah peserta diklat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	3 orang	100 %	26.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	29.040.000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02:06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>160.455.560</b>				<b>155.866.634</b>	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah komponen listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	6 alat	100 %	4.581.300			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.464.900
7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah alat tulis kantor & jumlah peralatan gedung kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	31 alat	100 %	80.238.860			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	85.474.521

7	1	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah peralatan rumah tangga	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	7 alat	100 %	2.535.400		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.911.865
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	JUMLAH KORAN DAN MAJALAH	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	7 EXEMPLAR	100 %	35.054.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	16.979.688
7	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	JUMLAH KORAN DAN MAJALAH	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	600 EXEMPLAR	100 %	9.126.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	11.042.460
7	1	1	02:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	JUMLAH KEGIATAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	360 BOX	100 %	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	17.424.000
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	JUMLAH RAPAT RAPAT DALAM DAERASH	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	225 OH	100 %	14.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	17.569.200
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02:07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>44.754.000</b>					<b>26.784.681</b>

7	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah mebeulair	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	2 item	100 %	44.754.000			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	26.784.681		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02:08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>25.340.500</b>								<b>11.821.700</b>
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	BULAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	12 BULAN	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	-		
7	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	JUMLAH PRINTER	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	2 UNIT	100 %	3.883.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.271.300		
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	2 ORANG	100 %	6.457.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	7.550.400		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02:09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>359.315.500</b>								<b>2.112.875.050</b>
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	JUMLAH KENDARAAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	6 UNIT	100 %	92.299.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	22.875.050		

7	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	JUMLAH GEDUNG	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	1 GEDUNG	100 %	267.016.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	2.090.000.000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>200.111.340</b>			<b>288.972.474</b>		
7	1	2	02:01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>180.707.340</b>			<b>198.778.074</b>		
7	1	2	02:01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	JUMLAH PELKSANAAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	21 KEGIATAN	100 %	180.707.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	198.778.074
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>02:02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>							<b>19.404.000</b>			<b>90.194.400</b>		
7	1	2	02:02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	jumlah pelaksanaan pelayanan paten	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	1 tahun	100 %	19.404.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	20.344.400
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	JUMLAH JENIS LAYANAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	12 PELAYANAN	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	69.850.000

7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>5.359.850</b>			<b>40.007.803</b>	
7	1	3	02:01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								<b>5.359.850</b>			<b>16.895.835</b>	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	JUMLAH DOKUMEN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	1 DOKUMEN	100 %	5.359.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	16.895.835
7	1	3	02:03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								-			<b>23.111.968</b>	
7	1	3	02:03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	JUMLAH KADER PKK	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	56 ORANG	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	23.111.968
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>115.313.200</b>			<b>91.925.757</b>	
7	1	4	02:01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>115.313.200</b>			<b>91.925.757</b>	
7	1	4	02:01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	JUMLAH PELKSANAN	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	1 KEGIATAN	100 %	64.188.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	91.925.757

7	1	4	02:01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	JUMLAH PELAKSANAAN	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 KEGIATAN	100 %	51.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	-
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							<b>12.905.000</b>			<b>58.357.200</b>		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>02:01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>							<b>12.905.000</b>			<b>58.357.200</b>		
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	jumlah pelaksana hari besar nasional	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	3 kali	100 %	12.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	13.195.500
7	1	5	02:01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	jumlah rapat sosialisasi dan pembinaan wawawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	1 tahun	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	45.161.700

7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>73.370.880</b>		<b>80.707.968</b>		
7	1	6	02:01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>73.370.880</b>		<b>80.707.968</b>		
7	1	6	02:01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	jumlah pelaksanaan kegiatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	1 tahun	100 %	42.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	46.596.000
7	1	6	02:01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	jumlah pelaksanaan kegiatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	1 tahun	100 %	21.010.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	23.111.968
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen RPTK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut, Sukaresmi, Sukaresmi	100 %	1 dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	11.000.000
<b>TOTAL</b>												<b>2.810.503.259</b>		<b>4.862.254.438</b>			

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Sukaresmi Tahun 2021 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 14 Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut sebesar Rp. 2.810.503.259,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Masukan: APBD 2022 Rp. 57,291,500  
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan  
Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor  
Capaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Masukan : APBD 2022 Rp. 1,723,524,629  
Keluaran : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan  
Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai  
Capaian : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Masukan : APBD 2022 Rp. 6,361,300,-  
Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor  
Capaian : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tupoksi  
Masukan : APBD 2022 Rp. 26,400,000,-

Keluaran : Jumlah Pegawai Yang Mengikuti  
Hasil : Tersedianya Pegawai Yang Kompeten  
Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan : APBD 2022 Rp. 4,581,300,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan komponen/Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hasil : Terpenuhinya penerangan gedung kantor

Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : APBD 2022 Rp. 80,238,860,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Masukan : APBD 2022 Rp. 2,535,400,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Hasil : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Masukan : APBD 2022 Rp. 35,054,000,-

Keluaran : Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Capaian :

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Masukan : APBD 2022 Rp. 9,126,000,-

Keluaran : Jumlah Penyediaan Surat Kabar

Hasil : Meningkatnya wawasan pegawai

Capaian : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Masukan : APBD 2022 Rp. 14,400,000,-
  - Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Hasil : Jumlah tamu yang di fasilitasi
  - Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Masukan : APBD 2022 Rp. 14,520,000,-
  - Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Hasil : Koordinasi dengan instansi terkait
  - Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel
    - Masukan : APBD 2022 Rp. 44,754,000,-
    - Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Hasil : Tersedianya Kendran Dinas
    - Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Masukan : APBD 2022 Rp. 15,000,000,-
    - Keluaran : Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
    - Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor
    - Capaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Masukan : APBD 2022 Rp. 3,883,000,-
    - Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara
    - Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor
    - Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    - Masukan : APBD 2022 Rp. 6,457,500,-

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor

Hasil : Meningkatnya Meningkatnya kelancaran  
Pelaksanaan Tugas Kantor

Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintahan Daerah

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan  
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  
Jabatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 92,299,000,-

Keluaran : Jumlah Unit Pembayaran STNK dan Pemeliharaan  
Kendaraan Dinas

Hasil : Meningkatnya kelancaran administrasi kendaraan  
dinas operasional

Capaian : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan  
Lainnya

Masukan : APBD 2022 Rp. 267,016,500,-

Keluaran : Jumlah Gedung / Bangunan yang Terpelihara

Hasil : Meningkatnya kualitas Gedung Kantor

Capaian : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan  
**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan  
Publik**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan  
di Tingkat Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat  
Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 180,707,340,-

Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan  
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat  
Kecamatan

Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 19,404,000,-

Keluaran : Jumlah Penyusuna SP/SOP Pelayanan dan SKP yang ada di Kecamatan

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Capaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 5,359,850,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Forum Musyawarah Pembangunan di Tingkat Desa

Hasil : Tersusunnya Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan

Capaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

### **4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

e. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 64,188,200,-

Keluaran : Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

f. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Masukan: APBD 2022 Rp. 51,125,000,-

Keluaran: Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

Hasil : Meningkatnya kinerja aparaturnya Kecamatan

Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

## **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masukan : APBD 2022 Rp. 12,905,000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional (PHBN)

Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara

Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Masukan : APBD 2022 Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Jumlah Rapat Sosialisasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Capaian: Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 109.978.400,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Hasil : Meningkatnya Penyelenggaraan Koordinasi

Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
Masukan : APBD 2022 Rp. 42,360,000,-  
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan  
Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas  
Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor
  - b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif  
Masukan : APBD 2022 Rp. 10,000,000,-  
Keluaran : Jumlah Dokumen RPTK  
Hasil : Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas  
Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor
  - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan  
Masukan : APBD 2022 Rp. 21,010,880,-  
Keluaran : Jumlah Dokumen RPTK  
Hasil : Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas  
Capaian : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kantor

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sukaresmi Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sukaresmi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Sukaresmi

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sukaresmi Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukaresmi ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya

- komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
  5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Visi Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**